

**IMPLIKASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
18/PUU-XII/2014 TERHADAP TINDAKAN PENGELOLAAN LIMBAH
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1094 K/PID.SUS/2014)**

SKRIPSI

Oleh :

Nanang Sugiyanto

201410115142



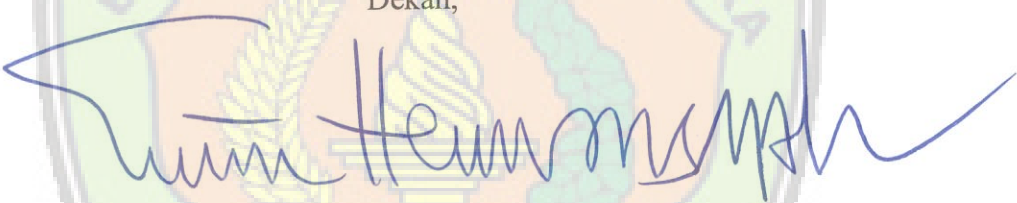
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **IMPLIKASI PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
18/PUU-XII/2014 TERHADAP TINDAKAN
PENGELOLAAN LIMBAH DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1094 K/PID.SUS/2014)**

Nama Mahasiswa : NANANG SUGIYANTO
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115142
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

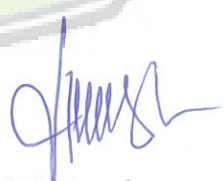
MENYETUJUI,
Dekan,


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., MH.
NIP 1804338

Pembimbing I,

Pembimbing II


Putra Perdana Ahmad S,SH.,MH
NIP 011503034


Hesti Widyaningrum, S.H., M.H
NIP 01150335

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi

: IMPLIKASI PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
18/PUU-XII/2014 TERHADAP TINDAKAN
PENGELOLAAN LIMBAH DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1094 K/PID.SUS/2014)

Nama Mahasiswa

: NANANG SUGIYANTO

Nomor Pokok Mahasiswa

: 201410115142

Program Studi/Fakultas

: Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 26 Juli 2018

MENYETUJUI,

Pembimbing I,

Pembimbing II



Putra Perdana Ahmad S,SH.,MH
NIP 011503034



Hesti Widyaningrum, S.H., M.H
NIP 01150335

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : IMPLIKASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XII/2014
TERHADAP TINDAKAN PENGELOLAAN
LIMBAH DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1094
K/PID.SUS/2014)

Nama Mahasiswa : NANANG SUGIYANTO

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115142

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Juli 2018

Bekasi, 26 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH

NIP 9511018

Penguji I : Drs. Octo Iskandar, SH.,MH

NIP 011603044

Penguji II : Hesti Widyaningrum, S.H., M.H

NIP 01150335

MENGETAHUI

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum



Elfirda Ade Putri, SH., MH
NIP 011512043

Dekan

Fakultas Ilmu Hukum



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.
NIP 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Nanang Sugiyanto

NPM : 201410115142

Judul Skripsi : Implikasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 Terhadap Tindakan Pengelolaan Limbah Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.1094.K/PID.SUS/2014)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan /atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, 26 Juli 2018

Yang membuat pernyataan


Nanang Sugiyanto

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nanang Sugiyanto
NPM : 201410115142
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakulta : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya berjudul :

IMPLIKASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XII/2014 TERHADAP TINDAKAN PENGELOLAAN LIMBAH DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1094 K/PID.SUS/2014)

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*data base*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : BEKASI

Pada tanggal : 26 Juli 2018

Yang menyatakan,


(Nanang Sugiyanto)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir. Peneliti panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat waktu, sebagai salah satu syarat kelulusan program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam Penelitian Skripsi ini Peneliti memilih judul : *“Implikasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 Terhadap Tindakan Pengelolaan Limbah Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1094 K/PID.SUS/2014)”*. Peneliti menyadari bahwa materi Skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan Skripsi dengan sebaik-baiknya.

Penelitian Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Putra Perdana Ahmad S, S.H., M.H., selaku Pembimbing I (Satu).
4. Ibu Hesti Widyaningrum S.H., M.H. selaku Pembimbing II (Dua).
5. Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh jajaran Civitas Akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran.
6. Kedua orang tua saya, Ayahanda (Alm) Soekawit Wirohardjono yang telah menginspirasi saya, dan telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh Kasih sayang dan pengorbanan. Ibunda (Almh) Sri Hartini yang telah melahirkan saya dengan susah payah dan mengorbankan Nyawanya,

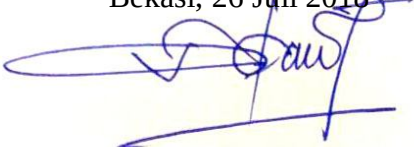
dan telah membesarkan saya dengan Cinta dan Kasih sayang sepanjang jalan.

7. Kepada Istriku tercinta Wisna Aziz, yang selalu mendukung dan memberikan pengertian yang amat dalam.
8. Kepada anak-anakku tercinta (Alm) Muhammad Daud Aziz, Tegar Malikul Mulki, Sekar Ayu Kencana, Kinar Ayu Kenanga yang telah memberikan semangat dan inspirasi tersendiri bagi kehidupan peneliti.
9. Kepada seluruh Sahabat terbaik saya Adi Suryo Dewantoro,SH.,MH, Ali Alghifari dan Rekan-rekan angkatan 2014 Yusron, Galang Panca, Martin Robert, Agus Yamtono, Irham Saleh, Rendhika Candra, Andi Maulana, dan yang saya tidak bisa sebutkan satu-persatu, yang selalu hadir di kala susah maupun senang sekaligus telah memotivasi saya dalam perkuliahan.
10. Kepada seluruh rekan-rekan PT. Omron Manufacturing Of Indonesia yang telah banyak memberikan Support terhadap penulisan dalam penulisan karya tulis ini.
11. Kepada keluarga besar Olahraga Tarung Derajat-AA BOXER Kabupaten Bekasi yang telah memberikan semangat dan daya juang hingga akhir perkuliahan ini.
12. Terimakasih kepada adik-adik saya tercinta yaitu Cipto Wardoyo dan Ade Tri Yulianto agar bisa memberikan motivasi untuk mewujudkan sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi sesuatu yang mungkin.

Sebagai manusia biasa, peneliti sangat menyadari dalam penelitian Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, peneliti selalu mengharapkan saran dan kritik secara konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan Skripsi ini.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bekasi, 26 Juli 2018



Nanang Sugiyanto

MOTTO

**“PERJUANGKANLAH HAK DENGAN KEBENARAN, KEJUJURAN DAN
KEADILAN SEBAGAI MASYARAKAT HUKUM”.**

***“PREPARE RIGHTS WITH TRUTH, HONESTY AND JUSTICE AS A
LEGAL COMMUNITY”.***

**“MANUSIA HARUS TAHU SIAPA DIA TADINYA, UNTUK
MENYADARI KELAK MENJADI APA DIA NANTINYA, SEJARAH
MASA LALUNYA ADALAH FAKTOR DASAR YANG TIDAK BISA
DIHINDARKAN BAGI MASA DEPANNYA”.**

Jaspers

***"HUMAN SHOULD KNOW WHO SHE HAD BEEN, TO BE REALIZING
THE BEHAVIENT WHAT HE IS IT, HISTORY OF THE TIME IS A
BASIC FACTOR THAT CAN NOT BE AVOIDED FOR THE FUTURE".***

Jaspers

PERSEMBAHAN

KEPADA KEDUA ORANG TUA KU YANG TERHORMAT
UNTUK ISTRIKU DAN ANAK-ANAKKU TERCINTA

ABSTRAK

Nanang Sugiyanto, 201410115142, Implikasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 Terhadap Tindakan Pengelolaan Limbah Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 2018. 90 Halaman

Penegakan hukum lingkungan, pada dasarnya diterapkan aparaturnya penegak hukum, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pelaksanaannya, Tidak jarang pihak penampung limbah B3 melakukan pengelolaan limbah B3 dengan pihak yang belum memperoleh izin pengelolaan limbah, maupun pihak yang belum memperoleh izin perpanjangan limbah B3. Hal tersebut dapat dilihat pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1094 K/Pid.Sus/2014. Pada karya tulis ini, peneliti hendak membahas mengenai bentuk kerugian yang timbul akibat tindakan pengelolaan limbah yang masih dalam proses perpanjangan dalam studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1094 K/Pid.Sus/2014 dan Implikasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 terhadap kasus Korupsi pengelolaan limbah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1094 K/PID.SUS/2014. Metode Penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan metode pengumpulan data yang menggunakan studi pustaka. Berdasarkan penelitian penulis, diketahui bahwa negara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1094 K/Pid.Sus/2014 yaitu pemerintah negara republik Indonesia mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa Bachtiar Abdul Fatah sebesar US \$ 9,990,210.93 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sepuluh koma sembilan puluh tiga Dollar Amerika) sesuai Laporan Hasil Penghitungan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-1025/D6/02/2012 tanggal 9 Nopember 2012, akibat dari pengelolaan limbah yang dilakukan tanpa izin perpanjangan pengolahan limbah, sebagaimana terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1094 K/PID.SUS/2014 dapat berpotensi mengakibatkan kerugian materiil pada negara, selain itu juga dapat mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat dalam bentuk pencemaran lingkungan apabila pengolahan limbah tersebut terjadi kelalaian.

Kata Kunci : Korupsi, Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3

ABSTRACT

Nanang Sugiyanto, 201410115142, Post-Decision Implication of Constitutional Court Number 18/PUU-XII/2014 Against the Act of Waste Management in Case of Corruption Crime. Legal Studies Program. Faculty Of Law. Bhayangkara Jakarta Raya University. 2018. 90 pages.

Enforcement of environmental law, basically applied to law enforcement apparatus, based on Law Number 32 year 2009 on Environmental Protection and Management. In its implementation, it is not uncommon for B3 waste collection parties to carry out B3 waste management with those who have not obtained a waste management permit, nor those who have not obtained B3 waste renewal license. This can be seen in the case of Supreme Court Verdict Number 1094 K / Pid.Sus / 2014. In this paper, the researcher will discuss about the form of loss arising from the waste management action which is still in the process of extension in case study of Supreme Court Decision Number 1094 K / Pid.Sus / 2014 and Post-Decision Implication of Constitutional Court Number 18 / PUU-XII / 2014 on Corruption case of waste management in Supreme Court Decision Number 1094 K / PID.SUS / 2014.

The research method used in this research is normative juridical research method, with data collection method using literature study.

Based on the authors' research, it is known that the state in the Supreme Court Decision Number 1094 K / Pid.Sus / 2014 ie the government of the republic of Indonesia suffered losses incurred by defendant Bachtiar Abdul Fatah amounting to US \$ 9,990,210.93 (nine million nine hundred ninety thousand two hundred ten commas Ninety-three US Dollars) according to the Report of the Result of Calculation of the Audit and Development Audit Board (BPKP) Number SR-1025 / D6 / 02/2012 dated November 9, 2012, as a result of waste management carried out without the permission of extension of waste treatment as found in the Court Decision Supreme No. 1094 K / PID.SUS / 2014 can potentially lead to material losses to the state, but it may also cause harm to the community in the form of environmental pollution if the waste treatment occurs negligence.

Keywords : Corruption, Environment, Waste Management B3

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI.....	iv
LEMBARAN PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAKSI.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konsep, dan Kerangka Pemikiran	5
1.5 Metode Penelitian	7
1.6 \Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kepastian Hukum.....	11
2.2 Hukum Lingkungan	14
2.3 Korupsi	19
2.4 Izin Pengelolaan.....	27
BAB III HASIL PENELITIAN	
3.1 Posisi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1094.K/PID.SUS/2014.	32
3.2 Posisi Kasus Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XII/2014.....	50
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN	
4.1 Kerugian Terhadap Tindakan Pengelolaan Limbah Yang Belum Mendapatkan Izin Perpanjangan Pengelolaan	63

4.2 Implikasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kasus Korupsi Pengelolaan Limbah Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1094.K/PID.SUS/2014	80
--	----

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran.....	90



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
DPPL	: Dokumen Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
ITB	: Institusi Teknologi Bandung
IPL	: Ijin Pengelolaan Lingkungan
LAPI	: Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri
LEMIGAS	: Lembaga Minyak dan Gas
Limbah B3	: Limbah bahan berbahaya dan beracun
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
Permen	: Peraturan Menteri
PID.SUS	: Pidana Khusus
PP	: Peraturan Pemerintah
PPSDAL	: Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan
PUU	: Perundang-Undangan
TIPIKOR	: Tindak Pidana Korupsi
UU	: Undang-Undang
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
UUPLH	: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

DAFTAR LAMPIRAN

- **Lampiran I Putusan Mahkamah Agung Nomor 1094 K/PID.SUS/2014**
- **Lampiran II Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014**
- **Lampiran III Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi**

